



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ARICH JUWADIANTO
2. Jabatan : POKJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG/JASA
3. NHK : 710653

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 424.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 262 m2/126 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 101.500.000
2. Tanah Seluas 2140 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, WARISAN Rp. 206.000.000
3. Tanah Seluas 430 m2 di KAB / KOTA SRAGEN, HASIL SENDIRI Rp. 117.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 103.400.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA FIT Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.600.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X125 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 8.800.000
3. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV M/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 92.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.590.000

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 8.273.976

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 538.763.976

III. HUTANG Rp. 185.820.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 352.943.976

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.